

[Wawancara Khusus Prof. Azyumardi Azra dengan Prof. Nurcholis Madjid 37 Silam: Tentang Demokrasi, Asas Tunggal, Pembaharuan dan Sekulerisasi \(1\)](#)

Ditulis oleh Luthfil Hakim pada Jumat, 04 Februari 2022

WAWANCARA KHUSUS

Nurcholis Madjid

Tentang Demokrasi, Asas Tunggal, Pembaharuan dan Sekularisasi

Doktor Nurcholis Madjid (46 tahun) kembali menjadi bintang. Demikian komentar banyak orang setelah menyaksikan dan mendengar ceramah Nurcholis Madjid staf peneliti LIPI dan dosen Fakultas Paska Sarjana IAIN Jakarta, pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Istana Negara pekan lalu. Sesuai ceramah, telepon di rumahnya yang terletak di kawasan Tanah Kusir Jakarta Selatan, tak henti berdering; sejak mengucapkan selamat atas isi ceramah itu sampai meminta kopy ekstra teks. Nurcholis Madjid yang pernah dua kali menjadi Ketua Umum PB HMI (1966-1969 dan 1969-1971) memperoleh doktor dalam bidang Ilmu Kalam/Filsafat Islam dari University of Chicago AS tahun lalu (1984). Ia pernah menghebohkan dengan gagasan pembaharuannya. Setelah enam setengah tahun absen dalam percaturan pemikiran di Indonesia, Nurcholis Madjid ternyata masih konsisten dengan gagasan pembaharuannya dulu, meskipun penampilannya lebih kalem. Pekan lalu ia menerima Azyumardi Azra dari Panjimas di rumahnya yang ditinggali bersama isterinya, Omi Komariah yang kini kuliah di IKIP Muhammadiyah Jakarta dan dua orang anaknya yang sudah remaja Nadia (15 tahun) dan Ahmad Mikail (11 tahun). Pembicaraan yang berlangsung lebih dua jam itu diturunkan selengkapnyanya:

● Telah tiga dasawarsa bangsa kita membangun, tetapi masih banyak masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Cak Nur, masalah-masalah besar apa saja yang dihadapi bangsa kita dewasa ini?

Pertama kali, saya kira secara sportif apapun segi kekurangannya, apapun segi kelemahannya, tetapi kehidupan rakyat setelah pembangunan harus dilihat dulu agar bisa membuat proyeksi yang obyektif. Pembangunan selain meningkatkan taraf hidup, jelas sekarang orang lebih mudah mendapatkan sandang, pangan dan papan walaupun yang terakhir ini masih luks. Nah, maksud saya, masalah semacam kepincangan antara si kaya dan si miskin; dulu ada, tetapi karena memang miskin, kesenjangan itu tak kentara. Namun sekarang karena lebih kaya, maka kesenjangan itu makin terasa, dan itu kelemahan yang sangat menyolok, dari pembangunan kita. Secara menyeluruh rakyat telah merasakan hasil-hasil pembangunan. Kalau saya pulang kampung di Jombang; semua rakyat punya nada bersyukur, walaupun berbarengan dengan itu mereka juga mengeluh, misalnya tentang padi yang masih sulit dijual dan sebagainya.

Tetapi yang lebih penting lagi, pembangunan selain meningkatkan taraf hidup rakyat secara materil, juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga terjadi peningkatan pen-



didikan yang menyeluruh. Sekarang, jika sebuah desa punya mahasiswa, bukan lagi hal yang aneh. Dan, yang bisa mengirimkan anak-anaknya ke universitas tidak lagi terbatas seperti zaman-zaman dulu. Dengan kata lain, pembangunan ini telah membawa kepada peningkatan level kecerdasan umum. Jadi, terang rakyat Indonesia makin cerdas meskipun dengan sedih kita misalnya membaca bahwa sumbangan il-

miah Indonesia kepada dunia masih rendah sekali, hingga sampai kalah dari Ethiopia. Betapapun, kecerdasan rakyat kita makin tinggi.

Meningkatnya kecerdasan rakyat yang diiringi dengan kenaikan pendapatan ekonomi akan melahirkan berbagai implikasi, antara lain, tuntutan politik yang lebih tinggi. Jadi, peningkatan kecerdasan itu akan membawa pula kepada peningkatan kesadaran politik. Dan peningkatan kesadaran politik itu juga akan mengakibatkan meningkatnya tuntutan politik atau *political demand*. Misalnya, rakyat Indonesia secara keseluruhan telah mulai berbicara tentang demokrasi, tentang keadilan sosial. Untungnya gitu, tapi sekaligus juga celakanya, itu semua termuat di dalam Pancasila. Untungnya ialah, bahwa tuntutan itu tidak baru, karena sudah ada dalam Pancasila. Celakanya, itu berarti Pancasila belum terlaksana.

Dengan kata lain, saya kira persoalan kita sekarang adalah pelaksanaan Pancasila itu sendiri; mana perikemanusiaannya, mana kerakyatannya, mana keadilan sosialnya. Kalau sila yang dua, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia sudah mendapatkan pendukung yang paling militan. Ketuhanan oleh kaum beragama, dan persatuan oleh ABRI dengan penggunaan istilah-istilah *security*, kesatuan bangsa dan sebagainya. Jadi kedua sila ini telah terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu ditingkatkan. Misalnya soal ketuhanan tentusaja orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang berpendapat, bahwa ketuhanan telah kuat jika mesjid telah banyak. Walaupun bukan itu persoalan yang sebenarnya, namun sekurang-kurangnya, sila pertama itu telah menemukan momentumnya, *inner dynamic*-nya, dinamika intinya. Demikian juga persatuan Indonesia. Tetapi sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, masih perlu pendukung-pendukung, dan kita tahu pasti pendukung-pendukung itu muncul dari rakyat, karena rakyat semakin mampu.

Mobilitas horizontal rakyat kelihatan nyata sekali. Kendaraan apa saja ke kota penuh sesak oleh orang-orang. Untuk saya

Prof. Nurcholis Madjid atau akrab disapa Cak Nur merupakan sosok cendekiawan muslim Indonesia yang sangat arif dan bersahaja namun katalog pemikiran dan praksisnya begitu sangat komplit. Jika meminjam istilah dari kiai Ulil Abshar Abdalla atau akrab disapa Pak Lurah Pondok, Cak Nur merupakan sosok “manusia hibrid” karena beliau terlahir dari kalangan keluarga Nahdlatul Ulama –buah pasangan dari KH. Abdul Madjid dan Ibu Fatonah– namun corak pendidikan dan pemikirannya –serta corak politiknya– begitu sangat modernis.

Hal ini ditandai dengan benih-benih pendidikan yang pernah beliau semai, mulai dari *nyantri* di Pesantren Darul Ulum Rejoso – Jombang pada tahun 1955, kemudian pada tahun 1960 jenjang pendidikannya dilanjutkan di Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo yang merupakan embrio dari lahirnya berbagai jenis pesantren modern di Indonesia, hingga menuntaskan pendidikan doktoralnya di University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1984.

Maka menjadi wajar jika Cak Nur begitu sangat progresif dalam membangun berbagai “piramida” wacana dan gagasan yang kemudian menuai berbagai respons –baik pro maupun kontra– dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia, utamanya gagasan “piramida” pembaharuan Islam dan sekulerisasinya yang sempat viral dan menghebohkan publik Indonesia pada dekade 70an.

Pada medio 1980an atau tepatnya pada tahun 1985, Cak Nur yang genap berusia 46 tahun kembali ke tanah air setelah enam setengah tahun lamanya dirinya “boyong” ke negeri “Mbah Sam” untuk menuntaskan pendidikan doktoralnya di University of Chicago, Amerika Serikat dalam bidang Ilmu Kalam atau Filsafat Islam dengan disertasinya tentang filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah (1984). Enam setengah tahun absen dari gelanggang pemikiran di Indonesia membuat Prof. Azyumardi Azra yang kala itu masih tercatat sebagai redaktur pelaksana *Panjimas* berkeinginan untuk mewawancarai sosok mercusuar pembaharuan Indonesia tersebut.

Baca juga: Ulama Banjar (140): Prof. Dr. H. M. Yusran Salman

Pekan pertama Desember 1985 Prof. Azyumardi Azra pun bertandang ke kediaman Cak Nur di bilangan Tanah Kusir, Jakarta Selatan dan kedatangannya pun disambut dengan hangat oleh Cak Nur serta Ibu Omi Komariah Madjid yang kala itu masih tercatat sebagai Mahasiswi di IKIP Muhammadiyah Jakarta, serta dua orang anaknya yaitu Nadia Madjid

yang baru genap berusia 15 tahun, serta Ahmad Mikail yang kala itu masih berusia 11 tahun.

Setelah enam setengah tahun absen dari gelanggang pemikiran di Indonesia, kira-kira apakah Cak Nur masih konsisten dalam membuat “piramida” wacana dan gagasan seperti halnya gagasan “piramida” pembaharuan Islam serta sekulerisasinya yang pernah beliau bangun sebelum dirinya *ngangsu kaweruh* di kawah candradimuka University of Chicago? Lalu bagaimana pandangan Cak Nur tentang Asas Tunggal dalam UU Keormasan yang telah disahkan dan diundangkan per tanggal 31 Mei 1985? Bagaimana juga tanggapan beliau tentang gagasan pembaharuannya, apakah masih sama atau sudah berubah? Serta bagaimana pula tanggapan mantan Ketua Umum PB HMI dua periode tersebut (1966-1969 dan 1969-1971) tentang sekulerisasi utamanya dalam tubuh umat Islam?

Berikut saya tuliskan kembali hasil wawancara dari Prof. Azyumardi Azra yang pernah dimuat oleh *Panjimas* No.488 – Tahun XXVII 28 Rabiul Awal 1406 H atau 11 Desember 1985, dan berikut petikan wawancaranya:

Telah tiga dasawarsa bangsa kita membangun, tetapi masih banyak masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Cak Nur, masalah-masalah besar apa saja yang dihadapi bangsa kita dewasa ini?

Pertama kali, saya kira secara sportif apapun segi kekurangannya, apapun segi kelemahannya, tetapi kehidupan rakyat setelah pembangunan harus dilihat dulu agar bisa membuat proyeksi yang obyektif. Pembangunan selain meningkatkan taraf hidup, jelas sekarang orang lebih mudah mendapatkan sandang, pangan dan papan walaupun yang terahir ini masih *luks*. Nah, maksud saya, masalah kepincangan anatara si kaya dan si miskin; dulu ada, tetapi memang karena miskin, kesenjangan itu tak kentara. Namun sekarang karena lebih kaya, maka kesenjangan itu masih terasa, dan itu kelemahan yang sangat menyolok, dari pembangunan kita. Secara menyeluruh masyarakat telah merasakan hasil-hasil pembangunan. Kalau saya pulang kampung ke Jombang; semua rakyat punya nada bersyukur, walaupun berbarengan dengan itu mereka juga mengeluh, misalnya tentang padi yang masih suit dijual dan sebagainya.

Baca juga: 122 Tahun Tebuireng dan Gus Dur (1): Mengajar, Mengaji, Bernalar

Tetapi lebih penting lagi, pembangunan selain meningkatkan taraf hidup rakyat secara

meteril, juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga terjadi peningkatan pendidikan yang menyeluruh. Sekarang jika sebuah desa punya mahasiswa, bukan hal yang aneh. Dan, yang bisa mengirimkan anak-anaknya ke universitas tidak lagi terbatas seperti zaman-zaman dulu. Dengan kata lain, pembangunan ini telah membawa kepada peningkatan-peningkatan level kecerdasan umum. Jadi terang rakyat Indonesia yang makin cerdas meskipun dengan sedih kita misalnya membaca bahwa sumbangan ilmiah Indonesia kepada dunia masih rendah sekali, hingga sampai kalah dari Ethiopia. Betapapun, kecerdasan rakyat kita makin tinggi.

Meningkatkan kecerdasan rakyat yang diiringi dengan kenaikan pendapatan ekonomi akan melahirkan berbagai implikasi, antara lain, tuntutan politik yang lebih tinggi. Jadi, peningkatan kecerdasan itu akan membawa pula pada peningkatan kesadaran politik. Dan peningkatan kesadaran politik itu juga mengakibatkan tuntutan politik atau *political demand*. Misal, rakyat Indonesia secara keseluruhan telah mulai berbicara demokrasi, tentang keadilan sosial. Untungnya *gitu*, tapi sekaligus juga celakanya, itu semua termuat dalam Pancasila. Celakanya, itu berarti Pancasila belum terlaksana.

Dengan kata lain, saya kira persoalan kita sekarang adalah pelaksanaan Pancasila itu sendiri; mana perikemanusiannya, mana kerakyatannya, mana keadilan sosialnya. Kalau sila yang dua, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Persatuan Indonesia sudah mendapat pendukung yang paling militan. Ketuhanan oleh kaum beragama, dan persatuan oleh ABRI dengan penggunaan istilah-istilah *security*, kesatuan bangsa dan sebagainya. Jadi, kedua sila ini telah terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu ditingkatkan. Misal soal ketuhanan, tentu saja orang bisa berbeda-beda. Ada orang berpendapat, bahwa ketuhanan telah kuat jika masjid telah banyak. Walaupun bukan itu persoalan yang sebenarnya, namun sekurang-kurangnya, sila pertama itu telah menemukan momentumnya, *inner dynamic*-nya, dinamika intinya.

Baca juga: Hendak Kemana Teologi Kita? Refleksi Haul ke-22 Romo Mangun

Demikian juga Persatuan Indonesia. Tetapi sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, masih perlu pendukung-pendukung, dan kita tahu pendukung-pendukung itu muncul dari rakyat, karena rakyat semakin mampu.

Mobilitas horizontal rakyat kelihatan sekali. Kendaraan apa saja ke kota penuh sesak oleh orang-orang. Untuk saya, yang absen selama enam setengah tahun, perkembangan itu sangat menyolok. Di dalam mobilitas horizontal ini implisit mobilitas vertikal, sebab misalnya orang pedalaman di Cianjur kini dapat pergi ke Bogor atau Jakarta karena kemampuan ekonomi. Perjalanan seperti ini, selain dianjurkan oleh al-Quran, jelas meningkatkan kualitas manusia. Jadi implisit di sini kemampuan atau kualitas. Itu juga akan meningkatkan taraf tuntutan politik.

Gampangnya begini; orang pedalaman Cianjur tadi ketika mulai perjalanan tidak mempunyai tuntutan apa-apa, tetapi begitu melihat apa-apa di perjalanan, maka ia akan mempunyai gambaran apa-apa yang ideal baginya. Jelas pada mulanya material, kemudian konsumerisme. Ini sebuah proses.